



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦩꦺꦤꦤꦺꦤ꧀

Jl. Brigjen Katarmas No 93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 378783 Fax (0274) 378783
EMAIL: gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upis@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.5/436
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : Rapat Koordinasi Penyusunan SPP
(Standar Pelayanan Publik)

Yogyakarta, 18 April 2024
Kepada
Yth. Terlampir

di-
YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada.

Hari, Tanggal : Kamis, 18 April 2024
Jam : 12:30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Ciptowening Kemantren GM
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan SPP (Standar Pelayanan Publik) Kemantren
Gondomanan
Bahan : SPP Kemantren Gondomanan
Penyelenggara : Kemantren Gondomanan
Pimpinan : Kepala Jawatan Umum

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

MANTRI PAMONG PRAJA

CAHYA WIPRAYANTA, S.Sos.
NIP 197011191996031003

Daftar yang Diundang :

1. Mantri Pamong Praja
 2. Mantri Anom
 3. Lurah 2 orang
 4. Kepala Jawatan 5 Orang
 5. Ka. Sub Bagian 2 Orang
 6. Penelaah Kebijakan
 7. Fungsional Umum 8 orang
- Jumlah = 20 Orang



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJU NE NGAYOGYOKARTO
KEMANDIRIAN – KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN – KEBERSAMAAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDONANAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦤꦺꦤꦤ꧀

Jl. Brigjen Katamsno No. 93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783
Fax (0274) 376783 EMAIL: gm@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis, 18 Maret 2024
Pukul : 12.30 WIB
Acara : Rapat Koordinasi Penyusunan SPP (Standar Pelayanan Publik)
Kemantten Gondomanan
Tempat : Ruang Rapat Cipta Wening Kemantren Gondomanan

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Dwi Ana	Kem GM	1 [Signature]
2	M. Agus Supro	Kem. GM	2 [Signature]
3	Catur	Kem. GM	3 [Signature]
4	F. ALWANI	Kel. Ngupasan	4 [Signature]
5	Purmono	Kem GM	5 [Signature]
6	Vida	Kem. Gondomanan	6 [Signature]
7	Esti Y	Kem. GM	7 [Signature]
8	Purmono, S.KM	Kem GM	8 [Signature]
9	Ardi Restu	Kemantren Gondomanan	9 [Signature]
10	Arutta Ruspita	Kemantren Gondomanan	10 [Signature]
11	Bimo	Kem. Gondomanan	11 [Signature]
12	Subowo	Kem Gondomanan.	12 [Signature]
13	Fajar Restu Putra	Kem Gondomanan	13 [Signature]
14	Sri Suwanti	Kem. Gondomanan	14 [Signature]
15	Alifina M-E	Kem. GM	15 [Signature]
16	Fausta Ostin	Kem. GM	16 [Signature]
17	Yuli P	Kem. Gondomanan	17 [Signature]
18	Susan	Kem GM	18 [Signature]
19	Sn' Suwarni	Kem. GM	19 [Signature]
20	Omy	Kem. GM	20 [Signature]

PPTK

[Signature]

Yuli Purwandari, S.Si
NIP. 198207012006042012



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦩꦺꦤꦤꦺꦤ꧀

Jl. Brigjen Katamsa No.93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783 Fax (0274) 376783
EMAIL : gm@jogjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Sidang/rapat	:	Rapat Koordinasi Penyusunan SPP (Standar Pelayanan Publik) Kemantren Gondomanan
Hari/Tanggal	:	Kamis, 18 April 2024
Waktu Panggilan	:	12.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Cipto Wening Kemantren Gondomanan
Waktu Sidang/rapat	:	13.00 Wib
Acara	:	1.Pembukaan 2.Pembahasan 3.Penutup
Pimpinan Sidang/ rapat	:	Jawatan Umum Kemantren Gondomanan
Pencatat	:	Ardi Restu Prafitra
Peserta Sidang/rapat	:	1. Mantri PP Gondomanan 2. Mantri Anom 3. Kepala Jawatan 4. Lurah 5. Staf Kemantren Gondomanan

Kegiatan Rapat :

1. Kata Pembukaan :

Rapat dibuka oleh Kepala Jawatan Umum dengan berdoa bersama.

Kepala Jawatan Umum menyampaikan bahwa dokumen SPP merupakan kelengkapan layanan yang harus dipublikasikan untuk warga masyarakat. SPP juga menjadi dokumen kelengkapan untuk evaluasi mandiri pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dan untuk kelengkapan laporan lain yang ada di Kemantren Gondomanan.

2. Pembahasan :

a. Jawatan umum menyampaikan SPP Tahun 2023

- Pada SPP tahun 2023 terdapat 13 SPP yang sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta No.30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kemantren dan Kelurahan berbasis elektronik
- Perlu adanya revidi SPP tahun 2023 untuk menyesuaikan peraturan yang terbaru, revisi yang akan dilakukan pada dasar hukum dan alamat Kantor Kemantren Gondomanan yang baru

b. Menyampaikan draft SPP Tahun 2024 :

- SPP tahun 2024 merevisi SPP tahun 2023, revisi yang dilakukan pada penambahan dasar hukum tentang pelimpahan kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja, revisi Alamat Kantor Kemantren yang lama menjadi Alamat Kantor Kemantren baru
- Penyusunan SPP baru yaitu SPP Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pondokan
- Akan diadakan FKP (Forum Konsultasi Publik) untuk mempublikasi SPP yang telah direvidi dan SPP baru.

3. Kesimpulan :

- a. SPP tahun 2023 yang direvisi sebanyak 13 SPP dan terdapat 1 SPP baru tentang Pelayanan Rekomendasi Persetujuan Pondokan, jadi SPP Kemantren Gondomanan sejumlah 14 SPP
 - b. Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk mempublikasi SPP akan dilaksanakan bersamaan dengan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Kemantren Gondomanan pada bulan Mei 2024
4. Penutup : Rapat diakhiri pada pukul 14.30 WIB dengan berdoa bersama

Pimpinan Sidang/rapat
Kepala Jawatan Umum


Yuli Purwandari, S.Si

NIP: 19820701 200604 2 012

















LAMPIRAN
BUKTI DUKUNG FORUM KONSULTASI PUBLIK
UNDANGAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GANDOMANAN

Yogyakarta

Jl. Brgen Klatenan No 93 Yogyakarta Kode Pos 55121 Telp. (0274) 376783 Fax. (0274) 376783
EMAIL: gnd@jakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: ukw@jakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Nomor : 000.1.5/564
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan FKP

Yogyakarta, 13 Mei 2024
Kepada
Yth.

di-
YOGYAKARTA

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara/i pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Jam : 12.30 - Selesai WIB
Tempat : Pendopo Krida Karya Kemantren Gondomanan
Acara : Forum Konsultasi Publik SPP Kemantren Gondomanan

Demikian atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

MANTRI PAMONG



[Signature]

CAHYA WIJAYANTA, S.Sos.
NIP. 197011319190651003



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGARWE MAJU NEGI KULDEKARTO
KEMANDIRIAN - KESIMPULAN - KEPERLUAN - KEREPRESIAN



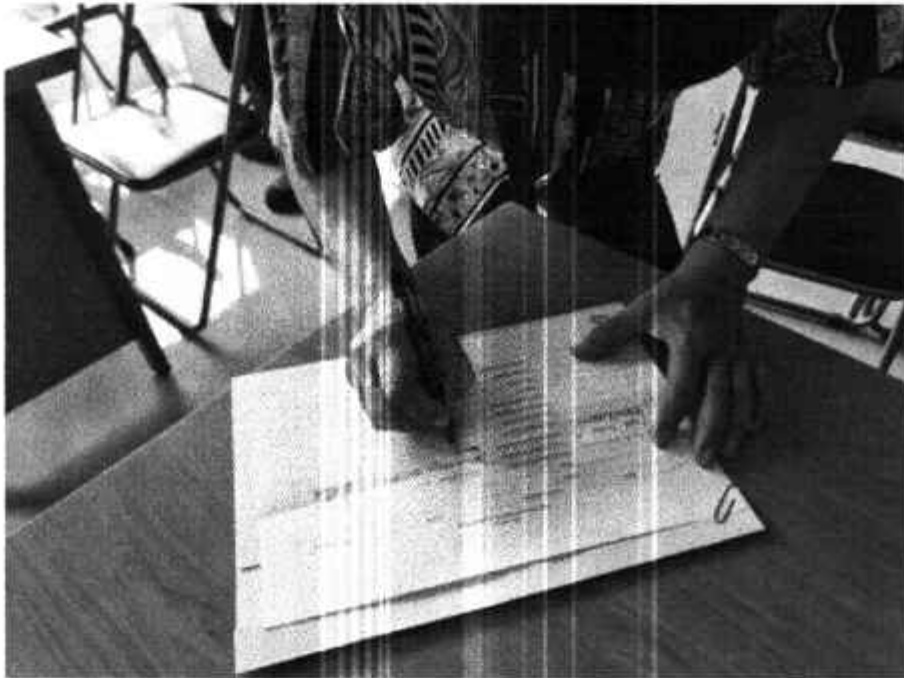
SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGARWE MAJU NEGI KULDEKARTO
KEMANDIRIAN - KESIMPULAN - KEPERLUAN - KEREPRESIAN

Daftar Yang Diundang :

1. Mantri Pamong Praja
2. Mantri Anom
3. Lurah 2 orang
4. Kepala Jawatan 5 Orang
5. Kepala Dinas DPMPPTSP
6. Kepala Dinas DPUPKP
7. Ketua LPMK Se-Kemantren Gondomanan
8. Ketua RW se-Kemantren Gondomanan

DOKUMENTASI









PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GONDONANAN

ꦏꦼꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦴꦤꦤꦺꦤ꧀

Jl. Brigjen Katamso No.93 Yogyakarta Kode Pos: 55121 Telp. (0274) 376783
Fax (0274) 376783 EMAIL: gm@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

NOTULEN RAPAT

Sidang/ Rapat : Forum Konsultasi Publik Kemantren Gondoomanan
Hari / tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Waktu Panggilan : 12.30 WIB s/d Selesai
Acara : Konsultasi Publik SPP Kemantren Gondomanan Tahun 2023
Pimpinan Sidang/ Rapat
Ketua : Mantri Pamong Praja
Pencatat : Ka Jawatan Umum
Peserta Sidang/ Pertemuan :
1. Mantri Pamong Praja
2. Mantri Anom
3. Lurah
4. Ka Jawatan
5. Kelompok Masyarakat
6. DPMPTSP
7. DPUPKP

Kegiatan Sidang/Rapat :

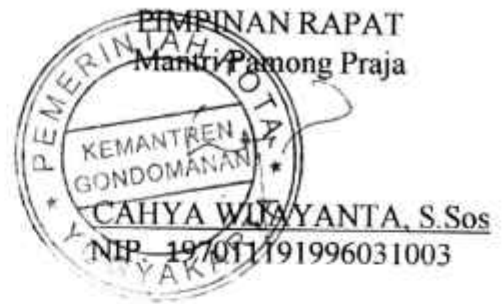
- Pembukaan** : - Acara diawali dengan penyampaian diskripsi singkat tentang pelimpahan kewenangan kepada kemantren, khususnya pada pelayanan publik oleh Mantri Pamong Praja.
- Mantri Pamong Praja menyampaikan tentang tentang Standar Pelayanan Publik yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur
- SPP yang ada di Kemantren Gondomanan merupakan Layanan yang sudah dilaksanakan di Kemantren Gondomanan sesuai dengan kewenangan Kemantren, dan perlu disepakati untuk waktu penyelesaian pelayanan.
- Pembahasan** : SPP perlu direviu karena perubahan kebijakan yang berimbas pada kewenangan Kemantren. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah yang mendapat pengaruh langsung dari masyarakat. Kebijakan baru yang semakin mempermudah layanan dan pemangkasan birokrasi, membuat Kemantren mempunyai kewenagan untuk memberikan rekomendasi pada pelayana perizinan dan kewenangan pendampingan

untuk beberapa pelayanan tertentu. Hal ini mewajibkan kemantren untuk segera merubah SPP.











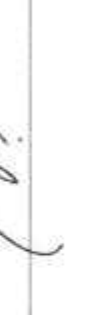

Kemantren mempunyai 3 (dua) jenis pelayanan yaitu legalisasi surat, Rekomendasi Persetujuan dan Pemberian Surat Keterangan Dispensasi Nikah yang kurang dari 10 hari. Namun jumlah layanan legalisasi terdiri dari 10 (Sepuluh) macam. Catatan yang paling penting yaitu posisi lembaga RT dan RW yang menjadi mitra pelayanan paling bawah atau terdekat dengan masyarakat. Posisi itu harus menjadi posisi penyaring pertama terhadap keberadaan dan kebenaran masyarakat. Sehingga pada proses legalisasi kemantren masih memberikan ruang yang besar terhadap adanya legalisasi dari RT dan RW. Catatan penting yaitu : legalisasi keberadaan pencari layanan berdasarkan domisili KTP setempat. Sehingga fungsi legalisasi tersebut tidak lebih dari mengetahui secara kependudukan saja. Namun pada hal ini permasalahan muncul ketika legalisasi tersebut menjadi hukum, bahwa Mantri Pamong Praja menguatkan atau mengerti atau menyetujui isi dari surat yang menjadi obyek layanan. Inilah yang kemudian masih menjadi wacana diskusi untuk dicarikan dasar hukum mana yang kemudian dapat dipakai oleh Kemantren bahwa posisi Mantri Pamong Praja hanya melegalkan secara administrasi kependudukan saja, atau kewilayahan saja. Oleh karena itu, masih dimungkinkan bahwa SPP akan berubah kembali, mengingat kebijakan yang cepat berubah dan penyesuaian dengan aturan yang mendasari yang memang belum ditemukan.

3. Kesimpulan :
- Untuk tahun 2024, SPP Kemantren Gondomanan berubah karena perubahan kewenangan perizinan yang tidak lagi dilimpahkan berdasarkan Perwal No. 19 Tahun 2023 Tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Kepada Mantri Pamong Praja yang dirubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Mantri Pamong Praja. Adanya perwal No. 30 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kelurahan dan Kemantren Berbasis Elektronik dan Perwal No. 51 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan.
 - Posisi MPP untuk melegalisasi surat, masih perlu dikuatkan oleh unsur RT dan RW selaku mitra pelayanan publik yang terdekat dengan masyarakat atau pencari layanan.

- Konsultasi Publik berikutnya akan dilaksanakan jika ada perubahan SPP yang sudah tidak relevan dengan peraturan yang ada.



Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Konsultasi Publik

No	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1	SHOMBA RITWANTU	LPMK	SAYIDAN 0M2/20	
2	Julianto	LPMK	Ratnakan 0M ² /047	
3	H. BUDI NUGROHO	RW Kelurahan Prawirodirjan	SAYIDANI 0M ² /77	
4	Joseph Dindra S	RW Kelurahan Prawirodirjan	Prawedonya 0M ² /614	
5	Reus Nugroho	RW Kelurahan Prawirodirjan	Prawedonya 0M ² /1107	
6	Moh. Zakiy Fardani	RW Kelurahan Ngupasan	Kaupun 0M ² /271	
7	Ika Ratnasari	RW Kelurahan Ngupasan	Ratnakan 0M ² /573	
8	Nur Inza Ayo.	RW Kelurahan Ngupasan	PWOF AKG.	
9	Bulan S	RW Kelurahan Ngupasan	Kaupun 0M ² /4	
10	Rath Mula Waputani	DPMPTSP	JL. Kerani 56	
11	Alfan B	Dinas PUPKP	JL. Kenan 50	
12	Tully Hornoko	Kelurahan Ngupasan	Jl. Mayor Suryotomo 575, NPS	
13	Ibu Lestri Nugroho	Kelurahan Prawirodirjan	Jk. Ireda 89	